

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN ...	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Tipe Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan Masalah	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	14
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II KEABSAHAN PEMUTUSAN KONTRAK PENGADAAN	
JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI DALAM	
LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)	17

2.1	Ruang Lingkup Kontrak Pengadaan Jasa Perencanaan Konstruksi	17
2.1.1	Pengadaan Barang atau Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	17
2.1.2	Kontrak Konstruksi	19
2.1.3	Kontrak Pengadaan Jasa Perencanaan Konstruksi	23
2.2	Jenis Perikatan yang Lahir pada Kontrak Pengadaan Jasa Perencanaan Konstruksi	24
2.2.1	Syarat Sahnya Kontrak Pengadaan Jasa Perencanaan Konstruksi	30
2.2.2	Para Pihak Kontrak Pengadaan Jasa Perencanaan Konstruksi	32
2.3	Syarat Pemutusan Kontrak Pengadaan Jasa Perencanaan Konstruksi dalam Lingkungan BUMN	34
2.3.1	Syarat Batal dan Syarat Putus dalam Hukum Perikatan	37
2.3.2	Keadaan Wanprestasi Penyedia	42
2.3.3	Syarat Notifikasi atau Syarat Peringatan Kepada Penyedia.....	45
2.4	Peraturan di Lingkungan BUMN	48
2.5	Pemutusan Sepihak dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung	50

BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSULTAN PERENCANA AKIBAT PEMUTUSAN KERJASAMA KONTRAK PERENCANAAN KONSTRUKSI	53
3.1 Implikasi Pemutusan Kontrak	53
3.1.1 Jaminan Pelaksanaan	56
3.1.2 Pelunasan Jaminan Uang Muka	56
3.1.3 Pembayaran Denda	57
3.1.4 Daftar Hitam (Blacklist)	58
3.2 Upaya Hukum Pihak Penyedia Jasa Atas Pemutusan Sepihak	62
3.2.1 Gugat Wanprestasi	65
3.2.2 Gugat Perbuatan Melanggar Hukum	67
BAB IV PENUTUP.....	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	